

Pengaruh DAK, DAU, PAD, DBH, UMR & Angkatan Kerja Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Tengah

Lusmino Basia¹ Afriyanti², Mahrus Lutfi Adi Kurniawan³

Universitas Mahakarya Asia -¹lusmino@unmaha.ac.id

Universitas Ahmad Dahlan -²afriyanti1800010129@webmail.uad.ac.id

-³mahrus.kurniawan@ep.uad.ac.id

Abstrak— *This study aims to analyze the effect of Special Allocation Fund (DAK), General Allocation Fund (DAU), Regional Original Income (PAD), Revenue Sharing Fund (DBH), Regional Minimum Wage (UMR), and Labor Force on Capital Expenditure in Central Java Province during the period 2016-2021. The main focus of this study is to evaluate how these variables affect the allocation and use of Capital Expenditure which in turn has the potential to increase the capacity and quality of regional infrastructure and support economic growth. Based on the results of the analysis, there is a significant negative effect of the variables GDP-1, GDP-2, and GDP-3 on economic growth in the short term. Direct investment has an insignificant effect on GDP in the short term. Although investment is important, the risks associated with investment, such as market risk, liquidation, interest rates, and politics, can negatively affect investment returns if not managed properly. Remittances show a significant effect on GDP in the short and long term. Remittances can increase people's income, especially for migrant worker families, which in turn can reduce poverty. However, if not managed properly, remittances can also have a negative impact. Interest rates do not show a significant impact on GDP in the short term, high interest rates can dampen consumption as borrowing becomes more expensive, which can negatively affect the economy.*

Keywords: *Upah Minimum, Investasi Langsung, Nilai Impor, Remitansi, Suku Bunga*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di suatu daerah merupakan sebuah tahap dimana suatu pemerintahan di daerah serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya yang telah tersedia dan dapat membentuk suatu sistem penopang antara pemerintah daerah maupun terhadap sektor swasta dimana bertujuan guna untuk menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengurangi peningkatan terhadap pengangguran sehingga dapat mengembangkan serta meningkatkan pendapatan di sektor perekonomian lebih meningkat. Pembangunan di suatu daerah di seluruh indonesia lebih khususnya di Jawa Tengah masih banyak hambatan dari sistem pembangunan ekonomi cenderung bersifat terpusat khususnya dibidang perekonomian pemerintah mengantisipasi suatu hambatan yang terjadi dengan cara menjadikan otonomi daerah sejak Tahun 2001 hingga sekarang yang bertujuan agar pemerintah dan masyarakat mampu lebih bahu membahu dalam peningkatan perekonomian daerah yang efektif dan efisien. prasarana di daerah yang berkedudukan otonomi khusus. Oleh karena itu, kebijakan alokasi DAK di prioritas utamakan untuk menjadi salah satu cara menyokong daerah dalam daya keuangan di bawah rata-rata nasional. Selain itu, strategi peruntukan DAK diutamakan agar mengacu pada akselerasi pembangunan daerah dari pembangunan dalam bidang sarana maupun prasarana di daerah yang berkedudukan otonomi khusus. (Setiadi & Khoirudin, 2022) Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan holistik yang memperhatikan kepentingan generasi mendatang selain memenuhi tuntutan saat ini.

Dana perimbangan adalah salah satu dana yang berasal dari pendapatan APBN yang akan diberikan pada suatu daerah itu sendiri dimana sebagai salah satu memenuhi kebutuhan

terhadap suatu daerah terhadap pelaksanaan. Desentralisasi, dapat kita ketahui dana perimbangan terdapat beberapa diantaranya dana bagi hasil, DAU serta DAK. Penggunaan DAK salah satunya untuk membiayai peningkatan suatu perekonomian dalam perdagangan maupun investasi pengadaan terhadap periode terbatas, yang tidak melebihi tiga tahun terakhir. Evaluasi efektivitas kebijakan merupakan salah satu jenis evaluasi kebijakan yang menilai apakah hasil dan dampak suatu program kebijakan sesuai dengan yang diharapkan, apakah tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud, dan apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan upaya yang telah dilakukan. Pemanfaatan DAK untuk berbagai kegiatan terealisasi melalui belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik. (Nasir dkk, 2022). Dalam pertumbuhan ekonomi ada beberapa indikator yang harus diperhatikan untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari kinerja perekonomian (Setyowati & Khoirudin, 2022). Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dianggap sebagai instrumen yang paling tepat untuk mengukur kemajuan suatu negara (Susanto dkk, 2023).

Pada investasi modal yang banyak maka kapasitas serta fasilitas dari publik bisa diperbanyak apabila APBD memenuhi syarat, agar dapat berpotensi yang akan dikembangkan menjadi salah satu sumber PAD agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun di sektor pemerintahan. Telah membuktikan bahwa agregat moneter memiliki dampak yang substansial dan terus-menerus terhadap output, harga, dan suku bunga (Kurniawan dkk, 2022). Untuk mencegah terjadinya krisis moneter, salah satu alternatif pendekatan yang ditempuh adalah dengan menerapkan sistem pengendalian moneter yang ditandai dengan kebijakan kenaikan suku bunga simpanan perbankan oleh pemerintah. Dengan demikian, untuk dapat meningkatkan salah satu pengolahan terhadap suatu belanja modal, harus mengetahui tentang beberapa variabel-variabel yang dimaksud sehingga yang berdampak pada pendistribusian belanja modal, diantaranya DAU, DAK serta Pertumbuhan Ekonominya (Salim, 2019). Semakin besar investasi yang dilakukan suatu negara akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai sebagaimana yang disebutkan dalam UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya investasi baik investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun investasi PMA (Penanaman Modal Asing) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga akan memeratakan dan meningkatkan kesejahteraan nasional secara kontinyu yang disebut sebagai pembangunan ekonomi. (Laveda & Khoirudin, 2020) Apabila daya beli Masyarakat menurun yang menyebabkan orang-orang mengurangi pembelian serta Masyarakat. (Atikasari dkk, 2023)

Investasi pemerintah juga memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Umumnya, kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, namun juga menjadi stimulus dalam melancarkan dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat dalam bentuk belanja modal. Sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya untuk mencari keuntungan semata namun digunakan untuk melakukan belanja modal dalam menunjang kehidupan masyarakatnya. (Perwitasari & Khoirudin, 2019) Pasar tradisional dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian bagi masyarakat menengah ke bawah.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh DAK, DAU, PAD, DBH, UPR dan Angkatan Kerja terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2021.

Belanja modal adalah suatu dana yang dikeluarkan pemerintahan daerah terhadap rangka penyediaan modal yang bertujuan untuk menambah terhadap aset/inventaris yang memberikan manfaat lebih terhadap pemerintahan, serta salah satu manfaat untuk menambah manfaat meningkatkan kapasitas dan kualitas asset. Belanja modal dapat dibagi kedalam beberapa 5

kategori utama diantaranya, Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal untuk pembuatan jakan, dan Belanja Modal Fisik.

DAK merupakan salah satu elemen dari dana perimbangan yang digunakan sebagai pengalokasian didapat dari APBN terhadap suatu daerah yang telah dikelola oleh pemerintah tertentu guna untuk membiayai kebutuhan secara khusus, baik dalam bentuk mensejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan di suatu pemerintahan. implementasi DAK bermaksud agar memodali sebuah kapitalisasi pasokan atau memperbanyak perbaikan aparatus dan alat baik secara fisik serta menyumbang agar membiayai pelaksanaan dan mengganti alat dan sarana tertentu apabila ada yang rusak tidak melebihi tiga tahun untuk menjaga sarana tersebut.

Dana alokasi umum yaitu salah satu dana yang diberikan pemerintah atau dana yang berasal dari suatu pendapatan suatu daerah atau yang sering kita sebut APBD yang dialokasikan kepada masyarakat dimana yang bermaksud agar kesetaraan terhadap keuangan antar daerah serta memodali keperluan daerah agar terdapat pemerataan ekonomi dalam pelaksanaan pemerataan secara keseluruhan. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Pendapatan merupakan faktor penting bagi setiap orang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh seseorang maka semakin banyak pula kebutuhan sehari-hari yang dapat dipenuhi(Ariesa et al., 2024). Dapat dilihat pada UU Nomor 33 Tahun 2004. Saat ini Dana alokasi umum telah mempertimbangkan penambahan gaji 5%, formasi CPNSD, THR, dan Gaji ke-13 + DAU Tambahan untuk bantuan dana kelurahan.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari beberapa instrumen pajak yang dipungut kepada wajib pajak yang bertempat di suatu daerah tertentu. Misalkan salah satunya, di Kabupaten Cilacap terdapat perusahaan swasta di sektor pertambangan. Maka hasil dari pajak akan dibagi dengan Kabupaten Cilacap sebagai DBH. Namun, DBH tidak hanya sebatas itu, namun juga meliputi PBB, BPHTB, PPh, sumber daya alam mulai dari Kehutanan, Pertambangan umum, Perikanan, dan sejenisnya.

Upah minimum merupakan suatu imbalan bagi para pekerja dalam lingkungan usaha dari para pengusaha atau sebuah perusahaan yang dijadikan modal konstan rumah bruto, penyesuaian stok, dan ekspor yang dikurangi impor. Ketetapan upah minimum adalah penetapan pemerintah yang didasarkan atas saran dari jaminan sosial daerah serta komisi pengupahan dewan tenaga kerja mengenai tanggung jawab perusahaan untuk memberikan upah paling sedikit dalam jumlah tertentu kepada pekerja tingkat terendah. Upah minimum memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu negara. Upah minimum merupakan jumlah upah terendah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja berdasarkan peraturan pemerintah. Dalam konteks ini, kebijakan upah minimum menjadi salah satu alat penting untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan memastikan bahwa pekerja menerima penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (Wibowo & Khoirudin, 2019). Semakin tinggi upah minimum, semakin besar jumlah pengangguran karena turunnya permintaan tenaga kerja sehingga upah minimum sangat diduga mempengaruhi pengangguran.

Angkatan kerja mengacu pada sejumlah orang yang tersedia untuk bekerja dalam sebuah populasi atau negara tertentu pada suatu waktu tertentu. Angkatan kerja terdiri dari orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang yang mencari pekerjaan, dan mereka yang berpotensi bekerja jika ada pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, negara-negara berkembang seperti Indonesia rentan terhadap krisis yang disebabkan oleh gelembung ekonomi (bubble-driven crisis) yang dapat mengganggu harga aset, investasi, dan arus modal. Angkatan kerja dapat dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya, Pekerja Aktif (Employed), Pencari Kerja (Unemployed), Non-Pekerja (Not in the Labor Force), dan Kekuatan Kerja Potensial (Potential Labor Force). (Kurniawan dkk, 2023)

Hubungan antara Variabel dengan Belanja Modal ialah bahwa DAK, DAU, PAD, DBH, dan

Angkatan Kerja berpengaruh positif searah terhadap Belanja Modal. Sedangkan, UMR berpengaruh negatif atau berlawanan arah terhadap Belanja Modal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat dari LKPD Jawa Tengah dan BPS Jateng yang memiliki informasi khusus dalam penganggaran fiskal APBD (2016- 2021) dengan bentuk data *year on year* atau tahunan. Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Upah Minimum Regional, Angkatan Kerja dan variabel independent Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda data panel. Selain itu, perlu dilakukan pembuktian hipotesis yang diajukan dan mengetahui pengaruh variabel- variabel yang diteliti. Dimensi waktu dalam penelitian ini menggunakan data gabungan antara cross-sectional dan time series periode 2016-2021.

Dalam model, jumlah lag tersebut yang akan dipilih. Terdapat langkah- langkah eksperimental dalam model regresi data panel. Adapun persamaan model regresi data panel sebagai berikut.

$$BM_{it} = \alpha + \beta_1 DAK_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 PAD_{it} + \beta_4 DBH_{it} + \beta_5 UMR_{it} + \beta_6 AK_{it} + e$$

Dimana e = Koefisien Error, α = Konstanta, β = Koefisien Variabel, it = Intersep. . Dengan hipotesis awal (H_0) diterima atau menerima REM sebagai model terbaik daripada FEM. Dengan kata lain, terdapat efek yang bersifat acak di dalam setiap pengamatan sehingga REM dinilai lebih relevan digunakan daripada FEM.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum

Tabel 1 Deskripsi Umum Variabel

Variabel	Obs.	Rerata	Std. Dev.	Min	Max
Belanja Modal	210	100.13	25.54	39.64	251.81
DAK	175	90.32	6.56	45.18	104.32
DAU	175	99.79	0.43	98.27	100
PAD	210	117.68	20.05	72.24	180.18
DBH	175	83.77	17.14	48.41	100.64
UMR	209	1.748.395	2.852.590	1.265.000	2.810.025
Angkatan Kerja	175	527.863	215.742	62.775	1.034.794

Sumber: Data diolah, 2024

Merujuk pada tabel 1 diatas, belanja modal di Provinsi Jawa Tengah mencatatkan rerata realisasi 100.13% yang artinya semua kabupaten dalam wilayah administrasi Jawa Tengah menggunakan anggaran untuk belanja modal tanpa tersisa. Dengan kata lain, anggaran belanja modal habis untuk dibelanjakan barang-barang yang bersifat investasi. Namun meski demikian, masih terdapat daerah yang penyerapan belanja modalnya relatif kecil yakni 39.64%, yakni Kabupaten Kendal pada tahun 2020. Mungkin ini adalah efek dari pandemi COVID-19 sehingga ada pergeseran prioritas anggaran. Selanjutnya, realisasi tertinggi menyentuh angka 251.81% atau 151.81% lebih besar dari target realisasi. Ini terjadi di Kabupaten Pemalang pada tahun 2016.

Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus memiliki rerata realisasi 90.32%. Artinya, mayoritas Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tidak menyerap habis anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus dan hanya satu saja yang melebihi target realisasi yakni Kabupaten Grobogan pada tahun 2017 dengan mencatatkan realisasi sebesar 104.32% atau 4.32% lebih besar dari target.

Rerata DAU yang tercatat pada hasil olah data adalah 99.79% sehingga penyerapannya

efektif dan efisien karena mendekati 100%. Adapun nilai terendah tercatat 98.27% yang mendekati nilai rata-rata sehingga dapat disimpulkan hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah telah membelanjakan dana DAU dengan maksimal. Jika ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah, rata-rata realisasi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah melebihi target yang ditentukan yakni sebesar 117.68% atau 17.68% melampaui target.

Pencapaian paling baik dari realisasi PAD nyaris menyentuh 200% yakni 180.18%. Perolehan ini terjadi di Kabupaten Cilacap tahun 2017 yang memang memiliki sektor Pariwisata maju. Adapun realisasi PAD paling rendah terjadi di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2021 yakni sebesar 72.24%. Selanjutnya Dana Bagi Hasil (DBH) mencatatkan rerata realisasi sebanyak 83.77% sepanjang 2016-2021. Adapun realisasi terendah ada disekitaran 48.41% dan realisasi tertinggi tercatat sebesar 100.64%. Dalam sektor ketenagakerjaan, rerata tingkat upah di Jawa Tengah tercatat sebesar IDR. 1.748.395. Adapun upah tertinggi hanya tercatat IDR. 2.810.025 dan upah terendah tercatat IDR. 1.265.000. Antara upah tertinggi dengan upah terendah terpaut cukup jauh. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya instrumen di sektor ketenagakerjaan yang lain, yakni angkatan kerja memiliki rerata 527.863 jiwa. Angkatan kerja tertinggi sebesar 1.034.794 jiwa yang mana ini terjadi di Kota Semarang pada tahun 2020. Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah sehingga hal ini dapat diwajarkan mengingat statusnya yang padat penduduk. Kemudian, jumlah angkatan kerja paling rendah adalah Kota Magelang tahun 2017, yakni 62.775 jiwa. Jumlah angkatan kerja yang terlalu banyak dan terlalu tinggi akan mempengaruhi beban belanja modal dan juga mempengaruhi iklim pengangguran di suatu wilayah tertentu.

Uji Spesifikasi Model

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan regresi data panel sehingga *output* regresi terdiri atas CEM, FEM, dan REM sehingga diperlukan uji spesifikasi model untuk memilih satu model yang tepat dengan karakteristik data

Uji Chow

Uji chow ini berfungsi untuk menentukan sifat efek dari masing-masing regresi sehingga uji ini digunakan untuk menguji model terbaik antara model CEM dengan model FEM. Berikut ini merupakan *output* dari uji chow:

Tabel 2 Hasil Uji Chow

F (33, 133)	Prob > F
3.28	0.000

Sumber: Data diolah 2024

Merujuk pada tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai dari probabilitas F adalah 0.00 atau kurang dari 0.05 sehingga kesimpulannya adalah menolak hipotesis awal (H_0). Dengan demikian, FEM merupakan model yang terbaik untuk digunakan daripada CEM. Maka artinya, karakteristik data memiliki sifat efek yang tidak universal dalam setiap pengamatan sehingga CEM tidak relevan untuk digunakan sebagai model regresi.

Uji Hausman

Setelah mengetahui bahwa FEM lebih baik daripada CEM, maka perlu mengetahui juga bagaimana efek dalam setiap pengamatan apakah bersifat acak atau tetap. Berikut ini merupakan hasil dari uji hausman:

Tabel 3 Uji Hausman

Chi2 (4)	Prob > chi2
1.39	0.84

Sumber: Data diolah 2024

Merujuk pada tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas daripada chi square adalah 0.84 atau lebih besar daripada 0.05. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa hipotesis awal (H_0) diterima atau menerima REM sebagai model terbaik daripada FEM. Dengan kata lain, terdapat efek yang bersifat acak di dalam setiap pengamatan sehingga REM dinilai lebih relevan digunakan daripada FEM. Namun, masih perlu dilakukan pengujian antara REM dengan CEM.

Uji Langrange Multiple

Pengujian Uji LM digunakan untuk mengetahui model terbaik antara REM dengan CEM. Hal ini diperlukan untuk melihat sifat efek pada setiap pengamatan apakah bersifat acak atau acak namun universal. Berikut ini merupakan hasil dari uji LM.

Tabel 4. Hasil Uji Langrange Multiple

Chibar2 (01)	Prob > chibar2
30.09	0.000

Sumber: Data diolah 2024

Dari hasil Merujuk pada tabel 4 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai dari probabilitas chibar square adalah 0.000 atau kurang dari 0.05. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa REM merupakan model yang lebih baik digunakan daripada CEM. Sifat efek pada karakteristik data adalah acak di masing-masing pengamatan sehingga REM dinilai lebih relevan digunakan daripada CEM. Oleh karena itu penelitian ini mengadopsi model REM sebagai dasar pengambilan keputusan dan menjawab rumusan masalah.

Hasil Regresi REM

Tabel 5. Hasil Regresi REM

Variabel	Koef.	z	P > z
Dak	0.55	2.80	0.005
Dau	20.12	7.00	0.000
Pad	0.66	0.96	0.339
Dbh	-0.112	1.00	0.318
Umr	-0.000002	2.63	0.009
Angkatankerja	0.0000786	0.82	0.411
Cons	-1923.583	6.61	0.000

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 5 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dari REM dapat diformulakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Belanjamodal_{it} = & -1923.583 + 0.55dak_{it} + 20.12dau_{it} - 0.112dbh_{it} \\ & - 0.00002umr_{it} + 0.0000786angkatankerja_{it} + e \end{aligned}$$

Berdasarkan formula regresi pada gambar 1 maka diperoleh point-point sebagai berikut ini:

1. Konstanta menunjukkan nilai -1923 maka artinya adalah pada saat seluruh variabel independen bernilai 0 maka belanja modal akan menurun sebesar 1923%.
2. Ketika Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 1% maka belanja modal diprediksi akan meningkat sekitar 0.55% dari periode sebelumnya.
3. Ketika Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 1% maka belanja modal diprediksi akan meningkat sebesar 20.12%.
4. Ketika Dana Bagi Hasil meningkat sebesar 1% maka belanja modal diprediksi akan menurun sebesar 0.112%.

5. Ketika UMR meningkat sebesar 1% dari periode sebelumnya, maka belanja modal diprediksi akan menurun sebesar 0.00002%.
6. Ketika angkatan kerja meningkat sebesar 1% dari periode sebelumnya maka belanja modal diprediksi akan meningkat sebesar 0.0000786%.

Uji Asumsi Klasik

Bertujuan untuk menyajikan hasil dari deteksi anomali data yang mungkin akan menganggu kualitas penelitian atau penelitian menjadi bias.

Uji Multikolinieritas

Tabel 6 Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	1/VIF
dbh	1.97	0.50
umr	1.90	0.52
pad	1.25	0.80
dau	1.24	0.80
angkatankerja	1.10	0.90
dak	1.03	0.96

Sumber: Data diolah 2024

Merujuk pada tabel 6 dapat disimpulkan bahwa keterikatan antar variabel independen dalam model regresi dikategorikan lemah sehingga tidak menganggu keterikatanya dengan variabel dependen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 7 Uji Keterokedastisitas

Chi2 (1)	Prob > chi2
1.90	0.16

Sumber: Data diolah 2024

Merujuk pada tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa nilai dari probabilitas chi square pada uji Breusch-Pagan adalah 0.16 atau lebih dari 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa varian residu bersifat seragam atau homokedastisitas sehingga dalam model tidak ditemukan gejala heterokedastisitas atau varian yang bersifat heterogen atau berbeda-beda.

Uji Hipotesis

Setelah diketahui bahwa tidak terdapat permasalahan pada data dalam asumsi klasik, maka selanjutnya adalah melakukan interpretasi atas uji hipotesis pada regresi *random effect* (REM).

Uji Simultan / Uji F

Tabel 8. Hasil Uji Simultan

F_{tabel}	F_{hitung}	Alpha	Prob.
2.3	149.36	0.05	0.000

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} dan juga nilai probabilitas kurang dari α sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam model berpengaruh serentak dan signifikan terhadap belanja modal di Jawa Tengah pada tahun 2016-2021.

Uji Koefisien Determinasi / R²

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi		
Within	Between	Overall
0.52	0.07	0.38

Sumber: Data diolah, 2024.

Merujuk pada tabel 9 maka dapat diketahui nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0.52 atau 52%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan seluruh variabel independen dalam model dalam mempengaruhi atau menjelaskan variabel dependen adalah 52%. Adapun sisanya yakni 48% dijelaskan oleh variabel independen yang tidak diikutsertakan dalam model ini.

Uji Parsial / Uji T

Tabel10. Hasil Uji Parsial

Variabel	T _{hitung}	T _{tabel}	Prob.	Alpha
dak	1.99	1.66	0.049	0.05
dau	6.41	1.66	0.000	0.05
pad	1.24	1.66	0.217	0.05
dbh	0.38	1.66	0.702	0.05
umr	2.83	1.66	0.005	0.05
angkatankerja	0.24	1.66	0.810	0.05

Sumber: Data diolah, 2024.

Merujuk tabel 10 diatas, dapat disimpulkan beberapa poin dari hasil uji parsial sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dikarenakan nilai T_{hitung} lebih besar daripada T_{tabel}.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dikarenakan nilai T_{hitung} lebih besar daripada T_{tabel}.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dikarenakan nilai T_{hitung} lebih kecil daripada T_{tabel}.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dikarenakan nilai T_{hitung} lebih kecil daripada T_{tabel}.
5. Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dikarenakan nilai T_{hitung} lebih besar daripada T_{tabel}.

Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya adalah apabila dana alokasi khusus meningkat secara realiasi maka realisasi belanja modal juga akan meningkat. Menurut penelitian ini, setiap peningkatan 1% dari dana alokasi khusus diprediksi akan meningkatkan realisasi belanja modal 0.55%. Belanja modal memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Dana Alokasi Khusus merupakan instrumen yang penting dalam mendukung pembangunan di tingkat daerah dan merupakan bagian integral dari upaya atau wewenang Pemerintah Pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti di peroleh beberapa kesimpulan:

1. GDP dalam jangka pendek GDP -1 negatif tetapi signifikan 2009 hingga 2022 sedangkan GDP - 2 negatif tetapi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 hingga 2022 dan GDP-3 negatif dan tetapi signifikan dalam jangka pendek pada tahun 2009 hingga 2022. Meningkatkan GDP dapat meningkatkan perintaran agregat yang dapat menyebabkan peningkatan harga-harga sehingga inflasi meningkat. Inflasi yang tinggi dapat menghambat investasi, karena dapat mengurangi daya beli Masyarakat dan melemahkan daya saing perkeonomian.
2. Investasi langsung terdapat pengaruh pada investasi langsung dan tidak signifikan terhadap GDP dalam jangka pendek pada tahun 2009 hingga tahun 2022. Pernyataan ini sesuai dengan

hipotesis yang menyatakan bahwa investasi memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap GDP dalam jangka pendek namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi. Investasi memiliki resiko baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Resiko ini dapat berupa resiko pasar resiko likuidasi resiko suku bunga resiko dan resiko politik. Jika investor tidak memahami resiko investasi dan mengambil Langkah-langkah mitigasi resiko yang tepat, maka investor dapat mengalami kerugian

3. Nilai impor terdapat tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan dalam jangka pendek pada tahun 2009 hingga 2022. Sedangkan dalam jangka Panjang nilai impor tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan terhadap GDP pada tahun 2009 hingga 2022. Dapat di ambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh negatif nilai impor terhadap gdp dalam hal pengaruh negatif impor berlebihan dapat meningkatkan ketergantungan suatu negara terhadap negara lain hal ini dapat membuat perekonomian menjadi rentan terhadap gejolak ekonomi global.
4. Remitansi terdapat pengaruh signifikan terhadap gdp dalam jangka pendek pada tahun 2009 hingga 2022. Remitansi berpengaruh dan juga signifikan terhadap gdp dalam jangka pendek pada tahun 2009 hingga 2022. Remitansi -1 negatif tetapi signifikan dalam jangka pendek pada tahun GDP 2009 hingga 2022. Sedangkan dalam jangka Panjang remitansi berpengaruh terhadap gdp pada tahun 2009 hingga 2022. Dapat di ambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh dan tidak berpengaruh remitansi terhadap GDP remitansi dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat terutama bagi keluarga pekerja migran hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan mengurangi kemiskinan sedangkan dampak negatif remitansi juga dapat memiliki dampak negatif bagi suatu negara terutama jika remitansi tidak di Kelola dengan baik
5. Suku bunga terdapat tidak terdapat pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap GDP dalam jangka pendek pada tahun 2009 hingga 2022. Sedangkan suku bunga -1 tidak signifikan tetapi terdapat pengaruh terhadap GDP dalam jangka pendek pada tahun 2009 hingga 2022 sedangkan dalam jangka panjang suku bunga tidak signifikan dan tidak terdapat pengaruh terhadap gdp pada tahun 2009 hingga 2022. Dapat di ambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh dan tidak terdapat pengaruh suku bunga terhadap gdp dalam hal positif yakni suku bunga yang rendah dapat mendorong investasi dengan membuat pinjaman lebih murah hal ini karena suku bunga yang rendah akan membuat bisnis lebih mudah mendapatkan pinjaman untuk ekspansi atau pengembangan usaha, sedangkan dalam hal negatif suku bunga yang tinggi dapat melemahkan konsumsi dengan membuat pinjaman menjadi lebih mahal. Hal ini karena suku bunga yang tinggi akan membuat Masyarakat cenderung mengurangi konsumsi, terutama untuk barang dan jasa yang tidak esensial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesa, S., Khoirudin, R., & Haifa, D. (2024). *Pengaruh Pengangguran , Belanja Daerah dan Pendapatan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 10 Provinsi Indonesia*. 22, 148–157.
- Atikasari, N.A., Khoirudin, R., & Saleh, R. (2023). Analysis of the Influence of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Minimum Wage, Population, Education, and Unemployment on Labor Force Absorption in Districts/Cities of Central Java Province, 2017-2021. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 1(3), 263-270.
- Kurniawan, M. L. A., A'yun, I. Q., & Perwithosuci, W. (2022). Money Demand in Indonesia: Does Economic Uncertainty Matter? *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 23(2), 231–244. <https://doi.org/10.18196/jesp.v23i2.15876>
- Kurniawan, M. L. A., Khasanah, U., & Baharudin, S. 'Aisyah. (2023). Determinant of Property Price Through The Monetary Variables: An ARDL Approach. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 24(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/jep.v24i1.20588>
- Laveda, M., & Khoirudin, R. (2020). Analisis Nilai Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Periode 2015-2019. *Jurnal Inovasi*, 16(2), 223-232.
- Nasir, M. S., A.K., M. L., Andriyani, N., Wibowo, A. R., & Oktaviani, Y. (2022). Credit Guarantee the National Economic Recovery Program (PEN) for MSMEs: A Case Study of MSMEs for Bank Pembangunan Daerah DIY. *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 17(2), 158–170. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v17i2.2022.pp158-170>

- Perwitasari, A., & Khoirudin, R. (2019). Market Analysis of Bantul Markets After Revitalization. *Proceedings of the 1st International Conference on Life, Innovation, Change and Knowledge*, 278-281.
- Salim, A. (2019). Macroeconomic Determinants of Interest Rate Volatility in Indonesia: A Structural VAR Analysis. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 5(2), 101–108. <https://doi.org/10.33094/8.2017.2019.52.101.108>
- Setiadi, L., & Khoirudin, R. (2022). Analisis Kausalitas Antara Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Asia Tenggara. *Eqien : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 82-95.
- Setyowati, R., & Khoirudin, R. (2022). Pengaruh DAU, Jumlah Penduduk, IPM Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 6(1), 83-89.
- Susanto, J., Khoirudin, R., Ningsih, S.K., & Lubis, F.R.A. (2023). The Role of Research and Development (R&D) on Gross Domestic Products (GDP) (Case Study USA, China, Japan, Germany and the UK). *Journal of International Conference Proceedings*, 6(1), 1-13. <https://doi.org/10.32535/jicp.v6i1.2223>
- Wibowo, A. R., & Khoirudin, R. (2019). Analysis of Determinants of Poor Population in Central Java 2008-2017. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v14i1.1482>